

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PEMBERIAN
KREDIT BRIGUNA LEMBAGA PERBANKAN PADA PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) CABANG TUBAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma 3

Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh :

KOESMA MALIKA IKA KINASIH

NIM : 2015110947

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Koesma Malika Ika Kinasih
Tempat, Tanggal Lahir : Merauke, 30 Mei 1997
N.I.M : 2015110947
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam
Pemberian Kredit Briguna Lembaga Perbankan Pada
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban

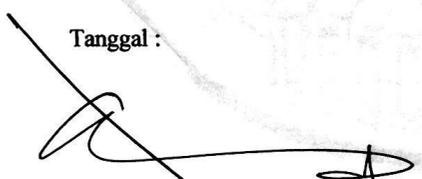
Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Diploma 3

Dosen Pembimbing,

Tanggal :

Tanggal :


(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM)


(Dr. Lutfi, SE., M.Fin)

**THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE
GOVERNANCE IN THE PROVISION OF BRIGUNA CREDIT
OF BANKING INSTUTIONS IN PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) CABANG TUBAN**

KOESMA MALIKA IKA KINASIH

2015110947

2015110947@students.perbanas.ac.id

STIE Perbanas Surabaya

Dr. Lutfi, S.E., M.Fin

STIE Perbanas Surabaya

Email : lutfi@perbanas.ac.id

Wonorejo Timur 16 Surabaya

ABSTRACT

The research aims to determine whether the implementation of Good Corporate Governance at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tuban can help companies in managing credit banking risks and constraint to analyze what is happening in implementing Good Corporate Governance in managing credit banking risks. Transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness are the principles on which the implementation of Good Corporate Governance. The research employs case study approach with the objects of State-owned Babks, which PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tuban and data collection by using questionnaires distributed to each taken 55 customer respondents and 5 employee respondents. This study shows that the results of the application of the principles of Good Corporate Governance which include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness possite effect on the process of lending and increased trust of BRIGUNA credit customers.

Keyword: *good corporate governance in lending customer*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan

baik dan sehat. Menurut Husnan Suad (2007), kelemahan di dalam penerapan *good corporate governance* merupakan salah satu sumber kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara-negara tersebut pada tahun 1997 dan 1998. Menurut

Achmad Daniri (2005), tantangan terkini yang dihadapi karena prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* masih belum dipahami secara luas oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya.

Hessel Nogi S. Tanglisan (2003:9) berpendapat bahwa munculnya krisis ekonomi, khususnya krisis korporasi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, merupakan krisis *corporate transparency* yang sering melibatkan hubungan antara pemerintah dan dunia usaha, antara pengutang (*holders of debt*) dan pemberi utang yang seringkali melibatkan praktik *kronisme*. Pada era reformasi hal ini menuntut pembongkaran praktik-praktik lama yang tidak lagi sejalan dengan prinsip dasar pengelolaan usaha yang sehat. Dalam konteks ini berbagai penyimpangan terhadap norma-norma *good corporate governance*, seperti pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sektor perbankan. Permasalahan yang sama juga dialami oleh dunia perbankan nasional. Oleh sebab itu, penerapan tata kelola yang baik pada *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan keharusan dan landasan penting bagi keberhasilan mewujudkan visi dan misi serta kelangsungan usaha dalam perbankan. Penerapan GCG saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis perbankan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai dan sebagai upaya agar bank dapat bertahan dalam persaingan.

Sebagai mana di kemukakan oleh Caprio dan Levine (2002) terdapat dua hal yang saling terkait mengenai

lembaga intermediasi perbankan yang berpengaruh terhadap *corporate governance*. Pertama, bank merupakan sektor usaha yang tidak transparan, sehingga memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru menghambat mekanisme *corporate governance*. Masalah keagenan dalam sector keuangan perbankan pada hakekatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama masalah keagenan akibat utang (*debt agency problem*) dan kedua, masalah keagenan akibat pemisahan kepemilikan dan pengendalian (*separatiation of ownership and control*).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, ketaatan akan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*) dalam menjalankan perbankan dan segala prosedur yang ada didalamnya haruslah terlaksana dengan baik agar perbankan dapat berkembang dengan baik dan sehat. Salah satunya dalam prosedur pemberian kredit, dalam hal ini prinsip-prinsip *good corporate governance* haruslah dilaksanakan dengan baik agar dapat mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam prosedur dan strategi serta memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki.

Moh Wahyudi Zakarsyi (2008:4) berpendapat bahwa pada masa sekarang banyak masalah yang dihadapi oleh pihak bank terutama yang menyangkut kondisii kesehatan keuangan dikarenakan kurangnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate*. Masalah yang sering muncul adalah kredit bermasalah, bahkan ada kredit yang menjadi macet sehingga harus diputihkan. Secara teori banyak bank yang memberikan pinjaman dengan jaminan yang tidak sesuai dengan jumlah pinjaman akan berakibat buruk pada bank tersebut misalnya mengalami kebangkrutan dan likuidasi dari pemerintah. Untuk mengatasi terjadinya hal ini, maka pihak bank seyogyanya melakukan upaya pencegahan seperti meneliti apakah barang jaminan melebihi nilai pinjaman, apakah pihak kreditur mempunyai kemampuan menyelesaikan utangnya pada bank dan berapa lama batas waktu yang dapat diberikan pada pihak kreditur terhadap penyelesaian utangnya pada bank.

Thomas Suyatno (2007:14) mendefinisikan. kredit adalah suatu penyediaan uang yang dapat disamakan dengan suatu tagihan-tagihannya yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan. Proses pemberian kredit pada bank sebenarnya dimulai pada saat debitur mengajukan permohonan kredit dengan membawa persyaratan lengkap untuk kemudian dilakukan analisis. Setelah melakukan analisis kredit, maka kegiatan yang harus dilakukan oleh bank dalam rangka mengamankan fasilitas kredit yang diberikan adalah kegiatan pengelolaan dan pengawasan kredit yang dilakukan secara administratif maupun langsung.

Pengendalian kredit merupakan bagian dari pengendalian internal yang

bertujuan untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Pengendalian ini berguna untuk mengarahkan laju kegiatan perbankan agar tetap mengikuti tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dianggap penting karena akan mempengaruhi setiap aspek operasional bank. Untuk mengendalikan kredit, bank perlu menetapkan kebijakan kreditnya. Kebijakan ini kemudian berfungsi sebagai standar. Apabila kemudian dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka bank perlu melakukan perbaikan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatatkan peningkatan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) ke kisaran 2,23 persen pada tahun 2017 dari posisi tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016 yang berada di kisaran 2,13 persen (CNN Indonesia, 25 Januari 2018). Setelah perusahaan melakukan langkah penghapusan buku (*write off*), ternyata NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dilihat hanya membengkak sebesar Rp 9 triliun. Meski NPL membengkak, namun pertumbuhan kredit BRI pada tahun 2017 mencatatkan pertumbuhan. Penyaluran kreditnya mencapai Rp739,3 triliun atau mengalami peningkatan 11,4 persen dari tahun 2016 sebesar Rp663,4 triliun.

Dari sisi laba, perusahaan berhasil membukukan laba sebesar Rp 29,04 triliun pada tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan sebesar 10,74 persen secara tahunan (*year-on-year/yoy*) dibandingkan 2016 sebesar 26,23 triliun. Adapun, asset perbankan pelat merah itu mengalami peningkatan sebesar 12,2 persen dari Rp 1.003,6 triliun menjadi Rp 1.126,2 triliun.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penjelasan judul dapat dijelaskan sebagai berikut:

Good Corporate Governance

World Bank mendefinisikan *good corporate governance* sebagai berikut:

“kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Komite *Cadbury* yang dikutip Adrian Sutedi (2012: 1) mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah “mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.”

Kredit

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998 Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 11:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Briguna

Kredit BRIGuna yaitu Kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran yang berasal dari sumber penghasilan tetap/*fixed income* (gaji/uang pensiun). Kredit BRIGuna

terdiri dari kredit pegawai tetap (kretap) dan kredit pensiunan (KRESUN).

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Profil Usaha

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Iskandar Muda merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, khususnya yang melayani pemberian modal. Peranan BRI dalam melayani pemberian modal, lebih memprioritaskan kepada pengusaha kecil. Pengusaha kecil disini adalah ushawan/wiraswasta yang mempunyai modal kecil, Universitas Sumatera Utara tenaga kerja sedikit, peralatan yang digunakan sederhana serta memiliki prospek yang dapat dikembangkan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tuban mempunyai kegiatan/jasa bank sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
2. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
3. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
4. Pengembangan Fasilitas ATM dan Credit Card Sebagai salah satu outlet favorit saat ini maupun di masa-masa mendatang, BRI terus menerus

menyempurnakan dan melengkapi pelayanan ATM demi kepuasan nasabah.

5. Dengan mengimplementasikan sistem pelayanan transaksi nasabah yang baru, BRI telah memberikan ekstra pelayanan secara real-time on-line kepada nasabah. Antara lain; penyetoran dan penarikan simpanan nasabah di seluruh unit kerja BRI (giro, deposito, tabungan), penyetoran angsuran pinjaman di seluruh unit kerja BRI, dan pengiriman uang baik rupiah maupun valas.

Selama lima tahun terakhir kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Menunjukkan peningkatan yang terus menerus. BRI di tahun 2008 menempatkan posisi sebagai bank pencetak laba terbesar di tanah air. Dalam laporan keuangan yang diumumkan Selasa (31/3/2009), laba bersih konsolidasi BRI di tahun 2008 mencapai Rp 5,958 triliun yang naik 23% dibanding tahun 2007 sebesar Rp 4,838 triliun. Laba bersih BRI sebelumnya tahun 2006 sebesar Rp 4,257 triliun, tahun 2005 sebesar Rp 3,808 triliun, tahun 2004 sebesar Rp 3,633 triliun dan tahun 2003 sebesar Rp 2,58 triliun.

Dibandingkan bank besar lainnya di Indonesia laba BRI tahun 2008 juga menempati posisi teratas, sementara BCA sebesar Rp 5,8 triliun, Bank Mandiri Rp 5,3 triliun, BNI Rp 1,222 triliun. Pendapatan bunga bersih yang dicapai BRI tahun 2008 sebesar Rp 19,647 triliun atau naik 17,7% dibanding tahun 2007 yang sebesar Rp 16,687 triliun.

Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit di akhir 2008 sebesar 13,67% turun dari 2007 yang sebesar 16,66% sedangkan CAR dengan memperhitungkan risiko

kredit dan pasar sebesar 13,18% turun dari 2007 yang sebesar 15,84%. Rasio Kre dit Macet (NPL) gross sebesar 2,8% dan NPL ner sebesar 0,85% yang Universitas Sumatera Utara keduanya turun dibanding tahun 2007 masing-masing sebesar 3,44% dan 0,88%. Sedangkan Rasio Dana Terhadap Kredit (LDR) sebesar 79,93% yang naik dari tahun 2007 sebesar 68,80%. BRI memiliki total aset hingga akhir tahun 2008 sebesar Rp 246,076 triliun yang naik 21% dibanding tahun 2007 sebesar Rp 203,734 triliun.

"Dalam kondisi krisis ekonomi global yang secara langsung berdampak ke Perekonomian Indonesia, Bank BRI tetap mencatatkan hasil kinerja usaha yang menggembirakan," kata Direktur Operasional BRI Sarwono Sudarto. Kenaikan Total Aset atau skala usaha Bank BRI tersebut didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 41,46 persen, dari posisi Rp 113.85 triliun pada Desember 2007 menjadi Rp 161.06 Triliun pada Desember 2008. Dengan pertumbuhan kredit sebesar Rp 47,21 triliun tersebut *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank BRI Pada akhir tahun 2008 tercatat sebesar 79.93 persen naik dari posisi Desember 2007 sebesar 68,80 persen.

Sampai dengan saat ini, Bank BRI tetap berkomitmen minimal 80 persen dari total kreditnya disalurkan kepada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM yang bertumpu Pada ekonomi domestik selama ini telah secara langsung membantu menggerakkan perekonomian nasional dan terbukti tetap tumbuh serta tahan terhadap dampak krisis ekonomi.

Dana masyarakat yang berhasil dihimpun Bank BRI sampai dengan Desember 2008 tercatat sebesar Rp

201,50 triliun atau meningkat sebesar 21.77 persen jika dibandingkan dengan DPK tahun 2007 yang sebesar Rp 165,48 triliun. Komposisi DPK Bank BRI pada tahun 2008 masing-masing adalah sebagai berikut Giro Rp 39.91 Triliun (19.8 persen), Tabungan Rp 88,06 Triliun (43,69 persen).

Produk Kredit BRIGuna Bank BRI Cabang Tuban

BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun). BRIGUNA diberikan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif misalnya, pembelian barang bergerak/tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, pernikahan, dan lain-lain.

Pasar Sasaran dari BRIGuna ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI), Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai Tetap, yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Pegawai Perusahaan Swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam memberikan pelayanan BRIGUNA, Pejabat Kredit Lini harus melakukan analisis dan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Penilaian dilakukan atas instansi/perusahaan yang pegawainya akan dilayani BRIGUNA dan terhadap individu calon debitur.

1. Penilaian Kelayakan Instansi/Perusahaan.
 Penilaian terhadap instansi/perusahaan wajib dilakukan sebagai tahapan awal (prescreening) untuk melakukan

Perjanjian kerja sama pelayanan BRIGUNA, khusus bagi instansi/perusahaan yang belum memiliki Perjanjian kerja sama dengan BRI.

Penilaian dilakukan dengan menganalisis potensi pemberian kredit dari sisi jumlah pegawai, nominal penghasilan, persetujuan pimpinan instansi/perusahaan, dan pertimbangan lainnya untuk meyakinkan PKL bahwa instansi/perusahaan calon debitur layak untuk melakukan kerjasama dalam rangka pelayanan BRIGUNA. Selain itu penilaian juga dilakukan dengan cara PKL melakukan kunjungan (*on the spot*) ke alamat instansi/perusahaan dan bertemu dengan petugas/pejabat terkait.

2. Penilaian kelayakan calon debitur
 Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko BRIGUNA adalah dengan menggunakan Credit Risk Scoring (CRS), dimana pengukuran tingkat risiko dilakukan dengan mengevaluasi faktor-faktor utama dalam "siklus hidup" nasabah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kegagalan pengembalian kredit.

Suku Bunga

Suku Bunga 1,45%
Jumlah Kredit Rp10.000.000 - Rp500.000.000
Tenor Kredit 12 bulan - 24 bulan

Suku Bunga 1,54%
Jumlah Kredit Rp10.000.000 - Rp500.000.000
Tenor Kredit 36 bulan - 60 bulan

Biaya-Biaya

Biaya Provisi

1,5% dari jumlah pinjaman yang disetujui

Biaya Administrasi

Rp 100. 000, -

Biaya Pelunasan Dipercepat

Sesuai Ketentuan Bank

Biaya Keterlambatan Pembayaran

Syarat dan Ketentuan Berlaku

Biaya Asuransi

Sesuai Ketentuan Rekanan

Biaya Materai

Tidak ada

Biaya Lainnya

Biaya Jasa Notaris, Biaya Appraisal (Sesuai Ketentuan dari Rekanan)

Persyaratan

Min. Pendapatan Bulanan

Rp3.000.000

Usia Pemohon

Minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat pelunasan

Siapa Saja yang Bisa Mendaftar

WNI dan WNA

Keunggulan Kredit BRIGuna:

- Jangka waktu kredit mulai 1 sampai 15 tahun dengan suku bunga kompetitif.
- Plafon pinjaman mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 1 milyar.
- Biaya administrasi ringan.
- Nasabah pengaju juga diikutsertakan dalam asuransi jiwa.

Syarat Pengajuan:

- Calon Debitur merupakan WNI.
- Usia min. 21 tahun dan max. 55 tahun.

- Pendapatan minimum Rp 3 juta/bulan.
- Lokasi tempat tinggal/lokasi bekerja/usaha/praktek debitur di kota dimana KC/KCP berada.
- Wajib memiliki rekening di BRI.

Dokumen yang harus disiapkan

1. Dokumen Pribadi Calon Debitur:

- Copy KTP.
 - Copy Kartu Keluarga.
 - Copy NPWP.
 - Pas Foto 4x6.
2. Dokumen Penghasilan:
- Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan.
 - Asli SK pengangkatan pertama dan SK terakhir (bagi karyawan), atau SK Pensiun.
 - Copy Rekening Tabungan/Giro 3 bulan terakhir.
 - Copy Laporan Keuangan 2 tahun terakhir.

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Nasabah Kredit

BRIGuna

Tabel 4.1

DISTRIBUSI RESPONDEN NASABAH BERDASARKAN JENIS PEKERJAN

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
PNS	21	38%
Polisi	14	25%
Tentara	7	13%
Swasta	6	11%
Pensiunan Asabri	3	5%
Pensiunan Guru	3	5%
Wiraswasta	1	2%
Jumlah	55	100%

Dari tabel 4.1 dapat dilihat karakteristik pekerjaan responden nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban dengan rincian PNS sebanyak 21 responden (38%), Polisi sebanyak 14 responden (25%), Tentara sebanyak 7 responden (13%), Swasta sebanyak 6 responden (11%), Pensiunan Asabri sebanyak 3 responden (5%), Pensiunan Guru sebanyak 3 responden (5%), dan Wiraswasta sebanyak 1 responden (2%) dari total responden sebanyak 55 orang. Sehingga nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai PNS yang terdiri dari guru, bina marga, perhutani, karyawan bank dan lain sebagainya.

Distribusi Responden Berdasarkan Status Nasabah Kredit BRIGuna

Distribusi frekuensi menurut status nasabah responden nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
DISTRIBUSI RESPONDEN
NASABAH BERDASARKAN
STATUS NASABAH LAMA ATAU
BARU

Status	Jumlah	Persentase (%)
Lama	37	67%
Baru	18	33%
Jumlah	55	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usia responden nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban yang memiliki status sebagai nasabah lama sebanyak 38 responden (69%), dan sebanyak 17 responden (31%) memiliki status

sebagai nasabah baru dari total responden sebanyak 55 orang. Sehingga nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban sebagian besar memiliki status sebagai nasabah lama di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban.

Distribusi Responden Berdasarkan Jangka Waktu Nasabah Kredit

Distribusi frekuensi berdasarkan jangka waktu nasabah kredit responden nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
DISTRIBUSI RESPONDEN
NASABAH BERDASARKAN
JANGKA WAKTU MENJADI
NASABAH KREDIT

Jangka Waktu (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
0-1	3	6%
1-5	10	20%
5-10	34	68%
Lainnya	3	6%
Jumlah	55	100%

Dari tabel 4.3, dapat dilihat bahwa responden yang memiliki jangka waktu pinjaman kisaran 0 sampai 1 tahun sebanyak 10 responden (18%), sebanyak 21 responden (38%) memiliki jangka waktu pinjaman 1 sampai 5 tahun, sebanyak 21 responden (38%) memiliki jangka waktu pinjaman 5 sampai 10 tahun, dan lainnya sebanyak 3 responden (5%), dari total responden sebanyak 55 orang. Sehingga nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban sebagian besar memiliki jangka waktu pinjaman kredit

briguna berkisar 5 sampai 10 tahun pelunasan.

Hasil Wawancara

Dalam *Good Corporate Governance* terdapat lima prinsip, yakni transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*) yang kemudian dikenal dengan TARIF. Lima prinsip tersebut di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban dapat dikatakan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) karena didalam SOP mencakup lima prinsip *Good Corporate Governance*.

Penerapan *Good Corporate Governance* ditinjau dari Transparansi (*transparency*) dalam Pemberian Kredit

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penerapan GCG ditinjau dari transparansi (*transparency*) dalam pemberian kredit briguna di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban adalah memberikan nasabah informasi mengenai program promosi(bunga) kredit sehingga intensitas jumlah nasabah pinjaman akan meningkat. Dengan demikian penerapan GCG ditinjau dari transparansi (*transparency*) dalam pemberian kredit briguna di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kredit briguna.

Penerapan *Good Corporate Governance* ditinjau dari Akuntabilitas (*accountability*) dalam Pemberian Kredit

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penerapan GCG ditinjau dari Akuntabilitas (*Accountability*) dalam pemberian kredit briguna di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban adalah memberikan pelayanan prima dan excellent untuk menarik perhatian nasabah dan meningkatkan jumlah nasabah kredit briguna. Dengan demikian penerapan GCG ditinjau dari Akuntabilitas (*Accountability*) dalam pemberian kredit briguna di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban dapat menarik perhatian nasabah untuk mengajukan pinjaman kredit briguna.

Penerapan *Good Corporate Governance* ditinjau dari Kemandirian (*independency*) dalam Pemberian Kredit

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penerapan GCG ditinjau dari kemandirian (*independency*) dalam pemberian kredit briguna di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban adalah melakukan pelayanan dengan cepat dan akurat, selalu merahasiakan identitas nasabah, dan mematuhi setiap komitmen yang sudah ditetapkan. Dengan demikian penerapan GCG ditinjau dari kemandirian (*independency*) dalam pemberian kredit briguna di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban dapat berjalan sesuai SOP yang ditetapkan.

Penerapan *Good Corporate Governance* ditinjau dari Pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam Pemberian Kredit

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penerapan GCG ditinjau dari Pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam pemberian kredit briguna di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban adalah melakukan proses kredit harus terlepas dari benturan kepentingan dan melayani prosedur pemberian kredit dengan baik. Dengan demikian penerapan GCG ditinjau dari Pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam pemberian kredit briguna di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban dapat mempertanggungjawabkan tugasnya secara profesional dan proporsional.

Penerapan *Good Corporate Governance* ditinjau dari Kewajaran (*fairness*) dalam Pemberian Kredit

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penerapan GCG ditinjau dari Kewajaran (*fairness*) dalam pemberian kredit briguna di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban adalah melakukan proses kredit nasabah dengan adil berdasarkan nomor kedatangan dan kebutuhannya melalui pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian penerapan GCG ditinjau dari Kewajaran (*fairness*) dalam pemberian kredit briguna di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban dapat menerapkan prinsip keadilan secara baik.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kegiatan operasional

perbankan karena GCG merupakan Standar Operasional Perusahaan yang dapat menjadi acuan atau pedoman untuk setiap pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban dalam menjalankan tugas secara efektif, konsisten, standar dan sistematis. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban selalu berusaha menjalankan lima prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban, dan keadilan secara baik. Dalam memperbaiki layanan pegawai terhadap nasabah, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban melakukan pengawasan kepada pegawai untuk menghindari terjadinya *fraud* atau benturan kepentingan dan untuk mendisiplinkan pegawai. Selain itu pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban diwajibkan memahami isi dari SOP agar dapat menjalankan pekerjaan dengan baik dan sesuai SOP yang berlaku. Dengan menjalankan kegiatan operasional berdasarkan GCG maka nasabah merasa mendapatkan pelayanan prima dari pegawai dan menambah tingkat kepercayaan nasabah terhadap Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban.

Hambatan untuk Menerapkan SOP dalam Meningkatkan Layanan Perbankan

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan hambatan untuk menerapkan SOP pada peningkatan layanan yakni:

1. Nasabah memiliki keberagaman sifat yang berbeda, sedangkan didalam SOP tidak dijelaskan secara rinci mengenai keberagaman tersebut.

2. Proses SOP memakan waktu yang cukup lama mengakibatkan para pegawai merasa keberatan. Berikut ini merupakan solusi yang dapat digunakan oleh Bank Rakyat Indonesia dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi:

1. Keberagaman sifat yang berbeda antara pegawai atau nasabah dapat diperbaiki dengan cara memperlakukan pegawai atau secara adil, mempelajari karakteristik pegawai atau nasabah, serta membangun komunikasi internal dengan baik kepada pegawai atau nasabah, misalnya dengan penyampaian informasi yang baik.
2. Perlu adanya komitmen dan ketegasan yang tinggi para pegawai dalam menerapkan SOP yang baru untuk mempermudah penerapan SOP tersebut.
3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan SOP tersebut.
4. Dukungan dari pihak manajemen sebagai penanggung SOP sangat diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan SOP yang baik dilingkungan bank.

PENUTUP **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban berpengaruh

dalam peningkatan pemberian kredit, hal ini ditunjukkan dengan penerapan SOP yang berjalan efektif, konsisten, standar dan sistematis yang dapat mempermudah penyelenggaraan administrasi kredit sehingga dapat meningkatkan intensitas kepuasan nasabah kredit..

Penerapan *Good Corporate Governance* di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan para pegawai sudah memahami dari SOP yang sudah ada dan adanya pengawasan agar terhindar dari *fraud* serta nasabah sudah merasakan manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* yaitu pada aspek keadilan, pertanggungjawaban, kemandirian, akuntabilitas serta transparansi.

Pelayanan yang telah diberikan oleh Bagian Administrasi Kredit Briguna terhadap nasabah memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4.01 dari responden nasabah yang termasuk dalam kategori “Baik (Puas)” dan sebesar 4.48 dari responden pegawai. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden nasabah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bagian Administrasi Kredit Briguna.

Aspek akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kemandirian merupakan aspek dengan perolehan nilai tertinggi dari total nilai rata-rata kuisioner yang telah dibagikan dan diisi oleh responden nasabah. Dari aspek akuntabilitas, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban dapat menumbuhkan rasa percaya para nasabah. Dari aspek kemandirian, Bagian *Account Officer* dan Administrasi Kredit Briguna dalam memutuskan kredit sudah terlepas dari benturan kepentingan. Dari aspek

pertanggungjawaban, Bagian Administrasi Kredit Briguna sudah mematuhi setiap komitmen yang ditetapkan oleh bank.

Aspek transparansi dan keadilan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak bank, dikarenakan dari total nilai rata-rata kuisisioner yang telah dibagikan dan diisi oleh responden nasabah ternyata lebih rendah dari. Dari aspek transparansi disebabkan BRI tidak menyajikan laporan keuangan seperti kas, laporan laba rugi, laporan neraca secara transparansi karena itu merupakan rahasia bank. Kemudian aspek keadilan disebabkan Bagian Administrasi Kredit Briguna BRI tidak pernah menyebutkan nama nasabah., dikarenakan ADK bukan merupakan bagian dari *front liner* bank melainkan bagian *back office* yang hanya melakukan administrasi kredit saja. Penerapan *Good Corporate Governance* juga mengalami hambatan yakni keberagaman sifat nasabah serta pegawai, akan tetapi tidak menjadi hambatan yang besar bagi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban.

SARAN

Dari simpulan diatas, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban perlu meningkatkan aspek transparansi dan keadilan antara lain dengan mewajibkan pegawainya memahami semua produk dan jasa kredit yang ditawarkan kepada nasabah serta memberikan informasi kepada nasabah mengenai program-program promo kredit terbaru sehingga dapat menarik perhatian nasabah untuk melakukan pinjaman kredit. Selain itu Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban juga mewajibkan pegawainya untuk memahami produk

dan jasa kredit perbankan sehingga mampu memberikan pelayanan prima maka, nasabah merasa nyaman dan percaya.

Keberagaman pegawai sangat berpengaruh dalam kinerja perusahaan, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tuban perlu mengatasi keberagaman sifat pegawai antara lain dengan memperlakukan pegawai secara adil, mempelajari karakteristik pegawai, serta membangun komunikasi internal dengan baik, misalnya dengan penyampaian informasi. Sehingga keberagaman sifat pegawai dapat dijadikan sebagai keuntungan dalam menyelesaikan masalah.

Dalam peningkatan wawasan karyawan mengenai *Good Corporate Governance* Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban dapat melakukan pelatihan dan sosialisasi terhadap karyawan sehingga karyawan bank dapat memberikan pelayanan prima (*excellent*) kepada nasabah demi mendapatkan kepuasan nasabah dan tidak akan kehilangan kepercayaan nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) perlu menyediakan materi SOP pada e-*learning* BRI-Link untuk mempermudah pegawai mengakses atau mempelajari SOP yang terbaru.

Memberikan *reward* kepada pegawai yang telah berhasil menjalankan tugas sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia dengan baik dan memberikan *punishment* kepada pegawai yang tidak menjalankan tugas sesuai SOP yang telah ditetapkan.

Tersedia sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung penerapan SOP tersebut dan perlu adanya dukungan dari manajemen sebagai

penanggung SOP untuk mencapai keberhasilan pegawai dalam menjalankan tugas yang sesuai SOP.

Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian sehingga tidak hanya terbatas pada satu wilayah saja. Selain itu, dapat meningkatkan jumlah responden serta memperluas objek penelitian.

IMPIKASI

Berdasarkan penerapan *Good Corporate governance* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban dalam pemberian kredit sudah berjalan dengan optimal. Akan tetapi, dalam meningkatkan kepercayaan nasabah dan pelayanan *excellent* maka Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban perlu melakukan beberapa perbaikan. Adapun implikasi dari hasil penelitian ini adalah:

1. Perlunya pengadaan sosialisasi dan pelatihan pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban guna meningkatkan pengetahuan pegawai tentang *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Perlunya komitmen tinggi pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tuban guna memberikan pelayanan prima kepada nasabah.

DAFTAR RUJUKAN

Bank BRI (Online). <https://bri.co.id> diakses pada tanggal 13 April 2018

_____. File download sejarah BRI (<https://bri.co.id/sejarah>).

_____. File download visi dan misi BRI (<https://bri.co.id/tentang-bri>).

Bank Indonesia. (<https://www.bi.go.id/id/Default.aspx>, diakses pada tanggal 5 April 2018).

_____. 2017. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*. (https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_191017.aspx, diakses pada 5 April 2018).

Bank, World. 2005. *Corporate Governance Country Assessment: Republic of Indonesia*. Jakarta.

Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.

Diana, Kiki M. 2014. "Peranan Good Corporate Governnace Dalam Peningkatan Standar Layanan Perbankan Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Pemuda Surabaya", TA Sarjana tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.

Febriyanto, Danang. 2013. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Perusahaan". (<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23906/1/ANALISIS%20PENERAPAN%20GOOD%20CORPORATE%20GOVERNANCE.pdf>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018). Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). *Studi Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta: Prentice Hall.

Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasai dan Penghapusan Kredit Macet*.

- Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Imam, Sjahputra Tunggal dan Amin, Widjaja Tunggal. 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta : Harvarindo.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Jusuf, Jopie. 2014. *Analisis Kredit Untuk Credit (Account) Offica*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta.
- Moeljono, Djokosantoso, 2005. "Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance". Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Muhammad Fajar M. 2017. Jakarta : Kompas (Online). (https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/23/082400326/saling_saling.alip.bank.papan.atas diakses pada 4 April 2018).
- _____. *Organization for Economic Cooperation and Development*. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance 2004*. The OECD Paris.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016. *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Indonesia*. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/p/erbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-Bank-Umum/SAL%20-%20POJK%20Tata%20Kelola.pdf>, diakses pada 20 Maret 2018).
- _____. 2017. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 Tentang Tata Kelola bagi Bank Umum*. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/p/erbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-13-SEOJK.03-2017-.aspx>, diakses pada 28 Maret 2018).
- _____. 2017. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/p/erbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-14-SEOJK.03-2017.aspx>, diakses pada 28 Maret 2018).
- Susilo, J. Leo dan Sinamarta, Karle. 2007. *Good Corporate Governance Pada Bank, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya*, Bandung: Hikayat Dunia.
- Suyatno, Thomas. 2007. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : Gramedia
- Tangkilisan Hessel Nogi S. 2003. *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta : Balairung & Co.
- Taswan. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Pasal 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Online). (www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/t4cce89fb14e43/p

[arent/334](#), diakses pada 14 Maret 2018).

Yuniarti, Cintia. 2014. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan High Profile Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013”. <http://eprints.uny.ac.id/15294/1/Skripsi.pdf>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018). Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

